

**MENUJU KESEIMBANGAN KEKUATAN BARU DI TIMUR
TENGAH (STUDI KASUS HUBUNGAN DIPLOMATIK UNI
EMIRAT ARAB – ISRAEL)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

VANIA MEISAWITRI

07041381924193

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**MENUJU KESEIMBANGAN KEKUATAN BARU DI
TIMUR TENGAH (STUDI KASUS HUBUNGAN
DIPLOMATIK UNI EMIRAT ARAB-ISRAEL)**

SKRIPSI

Disusun oleh:

VANIA MEISAWITRI

07041381924193

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 20 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. Zulfikri Suleman, M.A
NIP. 195907201985031002



Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**MENUJU KESEIMBANGAN KEKUATAN BARU DI TIMUR TENGAH
(STUDI KASUS HUBUNGAN DIPLOMATIK
UNI EMIRAT ARAB-ISRAEL)**

SKRIPSI

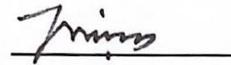
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 4 Januari 2023
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Tim Penguji Skripsi

Pembimbing:

Tanda Tangan

1. Dr. Zulfikri Suleman, M.A
NIP. 195907201985031002



Penguji:

Tanda Tangan

1. Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si
NIP. 198708192019031006



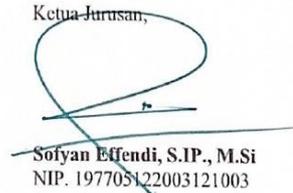
2. Cynthia Azhara Putri, S.H., M.Kn
NIDN. 0009029110



Mengetahui,



Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vania Meisawitri
NIM : 07041381924193
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 17 Mei 2002
Program Studi/Jurusan : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Menuju Keseimbangan Kekuatan Baru di Timur Tengah
(Studi Kasus Hubungan Diplomatik Uni Emirat Arab-Israel)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,



Vania Meisawitri
NIM. 07041381924193

HALAMAN PERSEMBAHAN

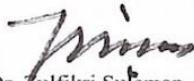
Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta: Bapak John Syafril dan Ibu Litariani yang senantiasa sudah berjuang untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada anaknya. Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan, dan kesabaran mereka yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini. Serta Almamater tercinta, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

ABSTRAK

Hubungan diplomatik adalah hubungan yang dilakukan antara negara satu dengan negara lainnya untuk memenuhi kepentingan masing-masing negara. Penelitian ini menjelaskan kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dan Israel untuk menuju keseimbangan baru di Timur Tengah. Kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik ini bertujuan untuk mencapai kepentingan kedua negara. Maka penulis menggunakan konsep kepentingan nasional milik Hans J. Morgenthau. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur seperti, buku, jurnal, penelitian, laporan, dokumen, internet, dan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dan Israel merupakan kesepakatan yang dapat mencapai kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Kata kunci: Normalisasi, Hubungan Diplomatik, Uni Emirat Arab, Israel, Kepentingan Nasional.

Pembimbing



Dr. Zulfikri Sufeman, M.A

NIP. 195907201985031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hubungan Internasional



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

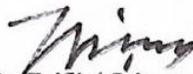
NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

Diplomatic relations are relations carried out between one country and another to fulfill the interests of each country. This research explains the agreement on the normalization of diplomatic relations between the United Arab Emirates and Israel in order to achieve a new balance in the Middle East. The normalization of diplomatic relations aims to achieve the interests of the two countries. So the writer uses Hans J. Morgenthau's concept of national interest. The research method used by the author is a qualitative method and the type of research is descriptive. Descriptive method is a method used to describe or analyze a research result. This research uses secondary data obtained from literature such as books, journals, research, reports, documents, internet, and news. The results of the study show that the agreement to normalize diplomatic relations between the United Arab Emirates and Israel is an agreement that can achieve prosperity, peace and stability in the Middle East region.

Keywords: *Normalization, Diplomatic Relations, United Arab Emirates, Israel, National Interest.*

Advisor



Dr. Zulfikri Suleman, M.A

NIP. 195907201985031002

Acknowledged,

Head of International Relation



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT untuk segala berkat, rahmat, dan karunianya dalam kehidupan penulis.
2. Orang tua saya, Bapak John Syafril, dan Ibu Litariani, serta kakak saya yang telah memberikan dukungan doa dan semangat.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga selama proses penyusunan skripsi.
7. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S.,M.Si dan Ibu Cynthia Azhara Putri, S.H.,M.Kn selaku dosen pembahas yang telah memberikan saran serta masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Mba Anty dan Mba Sertin selaku Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah membantu dalam penyelesaian administrasi kampus selama masa perkuliahan.

10. Kepada sahabat-sahabat saya, Nadilah Andini, Adelia Tri Ayu Ningtyas, Hana' Fairuz Akbar Lubis, dan Anggun Septiarani yang telah menemani dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2019.
12. Kepada Dokyeom dan Seventeen yang karyanya telah menemani, memberi dukungan, dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan.

Palembang, 19 Desember 2022

Vania Meisawitri
07041381924193

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang	15
1.2 Rumusan Masalah	23
1.3 Tujuan Penelitian	23
1.4 Manfaat Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 Penelitian Terdahulu	25
2.2 Kerangka Teori	29
2.2.1. Kepentingan Nasional.....	29
2.3 Kerangka Konsep.....	32
2.3.1. <i>Balance of Power</i>	32
2.4 Kerangka Pemikiran	37
2.5 Argumen Utama.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Desain Penelitian	38
3.2 Definisi Konsep	38
3.3 Fokus Penelitian.....	39
3.4 Unit Analisis	39
3.5 Jenis dan Sumber data.....	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40

3.7	Teknik Keabsahan Data	40
3.8	Teknik Analisis Data	42
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN		43
4.1	Potensi Timur Tengah.....	43
4.2	Keseimbangan Lama.....	49
4.3	Perkembangan-perkembangan Baru	54
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		59
5.1	Kepentingan Ekonomi	59
5.1.1	Kerja Sama Investasi dan Inovasi antara Abu Dhabi Investment Office (ADIO) dengan Invest in Israel dan The Israel Innovation Authority.....	59
5.1.2	Perjanjian Perdagangan Bebas	66
5.2	Kepentingan Pertahanan	71
5.2.1	Uni Emirat Arab Terlindungi dari Ancaman Iran dan Kekuatan Asing Lainnya	71
5.2.2	Kerja Sama Keamanan Siber.....	77
BAB VI PENUTUP.....		82
6.1	Kesimpulan	82
6.2	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN		88

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka	25
Tabel 2. 2 Perkembangan Lama	35
Tabel 2. 3 Perkembangan Baru.....	36
Tabel 2. 4 Kerangka Pemikiran	37
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Produksi Minyak di Timur Tengah dari Tahun 1998-2021	48
Gambar 5. 1 Tariq bin Hendi, Direktur Jenderal ADIO menandatangani perjanjian kerja sama secara <i>virtual</i> dengan David Leffler, Direktur Jenderal Kementerian Ekonomi dan Industri Israel	63
Gambar 5. 2 Menteri Ekonomi dan Industri Israel Orna Barbivay dan Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab Abdulla bin Touq Al Marri menandatangani perjanjian perdagangan bebas.....	68

DAFTAR SINGKATAN

ADIO	: <i>Abu Dhabi Investment Office</i>
AED	: <i>United Arab Emirates Dirham</i>
AS	: Amerika Serikat
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
GCC	: <i>Gulf Cooperation Council</i>
INEGMA	: <i>Institute for Near East and Gulf Military</i>
IoT	: <i>Internet of Things</i>
IPA	: Inisiatif Perdamaian Arab
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
OKI	: Organisasi Kerjasama Islam
OPEC	: <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PLO	: <i>Palestine Liberation Organization</i>
SIA	: <i>Signal Intelligence Agency</i>
UEA	: Uni Emirat Arab
UKM	: Unit Kecil Menengah
USD	: <i>United States Dollar</i>
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dari perspektif aliran realisme, keseimbangan kekuatan (*balance of power*) merupakan konsep yang sangat penting karena keseimbangan kekuatan tidak hanya terkait dengan gagasan aliansi anti hegemoni. Namun, juga terkait dengan gagasan bahwa negara-negara telah terbiasa berusaha untuk mempertahankan keamanan mereka dan menunjukkan kepentingan mereka dengan menggabungkan kekuatan dengan negara-negara lain. Jika satu kelompok negara bersekutu dalam upaya untuk mencapai kepentingan mereka, dapat diduga bahwa negara-negara lain yang mengamati perkembangan ini akan takut bahwa mereka mungkin menjadi korban dari aliansi ini sehingga mereka bergabung dan membentuk aliansi. Dalam hal ini, alih-alih membentuk aliansi untuk melawan hegemoni, aka nada dua aliansi yang bersaing dalam membangun keseimbangan kekuatan (Richard Little, 2007).

Konsep *Balance of power* merupakan konsep yang menjelaskan perang dan damai yang telah berlaku di antara negara-negara dan bangsa selama ini. Para ahli berpendapat bahwa *balance of power* tidak hanya mengandung ungkapan yang menuju kepada kemampuan militer dan penangkalan saja, namun juga terhadap seluruh struktur yang mengatur hubungan antar negara. *Balance of power* juga diartikan sebagai kemampuan dari entitas politik tertentu untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lain. Konsep *balance of power* juga menggambarkan bagaimana negara menangani masalah keamanan nasional dalam konteks pergeseran aliansi. Keseimbangan konsep kekuasaan dalam hubungan antar negara dapat dinyatakan dalam hal persamaan kekuasaan. Faktor-faktor dari kedua sisi persamaan ini mungkin kurang seimbang atau karena pihak pertama memiliki

kekuatan yang lebih besar dibandingkan pihak yang lain. Karena negara-negara berkuasa dan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan nasional masing-masing sehingga keseimbangan kekuasaan biasanya berada dalam kondisi yang tidak stabil (Jack C. Plano & Roy Olton, 1988).

Adanya konflik yang terus berlangsung di Suriah, Libya, Yaman, Irak, dan sekitarnya menempatkan kawasan Timur Tengah sebagai kawasan paling berbahaya di dunia. Dari 162 negara yang diukur dengan Indeks Perdamaian Global, Suriah, Irak, Afghanistan, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, berturut-turut menjadi negara yang memiliki tingkat keamanan terendah di dunia. Indeks ini dihitung berdasarkan 23 indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencakup tiga indikator terbesar, yaitu tingkat keamanan di masyarakat, konflik domestik dan internasional, dan seberapa tinggi militerisasi (“Timur Tengah, Kawasan Paling Berbahaya ,” 2016). Posisi geografis Timur Tengah yang sangat strategis yang menghubungkan bagian Timur dan Barat selama ini diklaim sebagai pusat utama konflik. Teori besar yang dikemukakan oleh Karl Haushoffer dan Mc Kinder yang menempatkan kawasan ini sebagai “*heart-land*” menjadikan pusaran konflik Perang Dunia I berpusat di Eropa dan menyebar ke kawasan Timur Tengah. Siapa yang menguasai Timur Tengah, maka ialah yang akan menguasai dunia (Surwandono, 2013).

Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang dianggap eksplosif di dunia. Timur Tengah juga merupakan kawasan yang sangat luas dan memiliki sumber daya yang melimpah, terutama minyak. Negara-negara Teluk menjadi penopang dalam memberikan kebutuhan energi bagi negara di dunia. Beberapa negara yang kaya akan minyak seperti Arab Saudi dan negara-negara Teluk, seperti Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Oman cenderung memihak ke negara-negara Barat. Berbeda dengan negara-negara lainnya seperti Syria, Aljazair, Libya, dan Mesir yang memiliki sumber

minyak lebih sedikit dibandingkan negara-negara yang berada di Teluk. Iran memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia, setelah Rusia. Namun, tidak memiliki infrastruktur untuk meningkatkan ekspor yang saat ini terbatas ke Irak dan Turki. Turki juga melakukan impor minyak dari Rusia pada tahun ini seiring untuk menjalin kerja sama bisnis dengan Rusia. Sehingga, negara-negara yang memiliki jumlah minyak lebih banyak intensif melakukan ekspor minyak yang kemudian dapat memengaruhi kebijakan luar negeri terhadap negara Barat.

Adanya konsep keseimbangan kekuatan dapat dijelaskan dengan mengidentifikasi negara-negara yang terlibat di dalamnya serta masalah-masalah yang terkandung di dalamnya. Perkembangan hubungan normalisasi yang terbuka antara Israel dan beberapa negara Teluk Arab telah muncul sebagai dinamika baru yang signifikan di Timur Tengah pada abad ke-21. Kawasan yang dilanda pergolakan dan perang saudara yang meluas, perubahan sikap geopolitik, dan persaingan antara aliansi yang berusaha memperluas pengaruh mereka, dinamika ini secara khusus menjadi strategi yang strategis untuk sisi Teluk. Meskipun hubungan formal antara Israel telah lama tertahan oleh konflik Israel-Palestina, kapasitas gerakan nasional Palestina yang semakin berkurang untuk memengaruhi politik regional telah memberikan keleluasaan bagi negara-negara Teluk untuk memprioritaskan kepentingan nasional mereka dibandingkan dengan kepentingan “Arab” (Omar Rahman, 2021).

Sejak berdirinya 23 tahun setelah kemerdekaan Israel, Uni Emirat Arab tidak pernah terlibat dalam peperangan dengan Israel, namun kebijakan serta sikap Uni Emirat Arab menunjukkan ketidaksepahaman dengan Israel. Lalu, sejak berdirinya Gulf Cooperation Council (GCC) pada tahun 1981, negara-negara anggota GCC yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mengambil sikap yang jelas dalam

kebijakan Israel terhadap Palestina dan ikut mengupayakan penyelesaian konflik Israel Palestina. Uni Emirat Arab juga mengecam berbagai kebijakan yang dibentuk oleh Israel terhadap Palestina. Uni Emirat Arab juga merupakan anggota dari Liga Arab. Negara anggota Liga Arab mempunyai kebijakan luar negeri untuk memboikot Israel dimana warga negara anggotanya tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli, maupun aktivitas bisnis dengan pemerintah Israel termasuk dengan warga Israel. Mereka juga memperluas pemboikotan utama ke negara maupun di seluruh dunia yang memiliki hubungan dengan Israel serta melarang negara anggota Liga Arab dan warga negaranya menjalin bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan oleh Kantor Liga Arab sebagai daftar hitam (Khairunnisa Yasir, 2021).

Pasca perang pada tahun 1973, beberapa negara Arab mulai membuka negosiasi perdamaian, terutama negara-negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel. Adanya upaya damai yang dilakukan negara-negara Arab menghasilkan Inisiatif Perdamaian Arab (IPA) atau Arab Peace Initiative pada tahun 2002 dalam pertemuan Liga Arab untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Inisiatif ini diusulkan dengan pengajuan bahwa konflik Israel dan Palestina tidak dapat diselesaikan secara tuntas dengan mengabaikan konteks regionalnya (Broto Wardoyo & Rizal Valentino, 2022). Arab Saudi menjadi pelopor pada Inisiatif Perdamaian Arab, yang kemudian menjadi simbol penyusunan yang diusulkan dalam hubungan Arab dengan Israel: Pertama negara Palestina di perbatasan pada tahun 1967 dan normalisasi hubungan dengan seluruh dunia Arab. Arab Saudi merupakan bagian dari poros negara-negara yang memiliki pemikiran sama untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang terkoordinasi serta berbagi strategi dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain mengenai hubungan dengan Israel (Omar Rahman, 2021).

Adanya penandatanganan mengenai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik pada 15 September 2020 yang dilakukan Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel dimana Uni Emirat Arab diwakili oleh Menteri Luar Negeri dan kerja sama internasional Abdullah bin Zayed al-Nahyan dan Israel diwakili oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Penandatanganan ini berlangsung di Gedung Putih yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebelumnya, pada 13 Agustus 2020 Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perjanjian mengenai kesepakatan perdamaian untuk menormalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel yang disebut dengan Perjanjian Abraham (Abraham Accord). Sebelum Uni Emirat Arab, Mesir dan Yordania lebih dahulu menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan demikian, Uni Emirat Arab menjadi negara ketiga yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Perjanjian yang terjadi antara Uni Emirat Arab dan Israel mendapatkan respons yang beragam dari negara lain, seperti Kanada, Inggris, Mesir, dan Bahrain yang menyambut baik terhadap perjanjian tersebut. Namun, ada juga negara yang mengkritik terhadap perjanjian tersebut, seperti Oman, Iran, Turki, dan Qatar. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menanggapi perjanjian tersebut dengan mengumpulkan para pemimpin Palestina, termasuk pimpinan Komite Pusat Fatah dan Komite Eksekutif Palestine Liberation Organization (PLO). Hasil dari pertemuan tersebut adalah otoritas Palestina di Tepi Barat dan kepemimpinan Hamas di Gaza mengumumkan penolakan penuh atas keputusan Uni Emirat Arab. Bahkan, PLO menarik duta besarnya untuk Abu Dhabi dan menyerukan kepada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menolak kesepakatan tersebut (Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, 2020b).

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kesepakatan normalisasi hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel berkaitan erat dengan kepentingan Donald Trump sebagai Presiden

Amerika Serikat. Adanya kepentingan Donald Trump tersebut berkaitan dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat yang diadakan pada November 2020. Trump berusaha untuk memenangkan kembali pemilihan presiden Amerika Serikat serta membutuhkan banyak dukungan suara termasuk dari masyarakat yang mendukung kebijakannya di Timur Tengah karena dukungan masyarakat terhadap Donald Trump mulai menurun yang disebabkan oleh kebijakannya yang tidak efektif dalam penanganan COVID-19 dan meluasnya unjuk rasa terkait rasisme. Namun, terlepas dari kepentingan Trump untuk pemilihan presiden tersebut, dukungan yang ia berikan terhadap normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Israel tidak dapat dipisahkan dari kebijakan presiden AS yang lebih memihak kepada Israel, khususnya dalam isu Palestina.

Sebelum negara-negara Arab memulai menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, sejak dulu hubungan mereka dibatasi oleh tembok yang kuat karena adanya faktor perbedaan ideologi antara Islam dan Yahudi serta adanya sejarah kolonialisme yang menjadikan pemetaan konflik antara Islam dan Yahudi di Timur Tengah yang belum selesai. Kemudian, pada akhir 2020, beberapa negara termasuk Uni Emirat Arab mengumumkan diri bahwa telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Tentunya normalisasi hubungan diplomatik ini tidak terlepas dari campur tangan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel ini merupakan kesepakatan politik terbesar di dunia (Yulia Rimapradesi & Ahmad Sahide, 2021).

Kemudian pada 2019, Uni Emirat Arab dan Israel telah mencapai kesepakatan transaksi dalam kerja sama intelijen sejak dekade lalu sebesar 3 miliar dollar AS. Israel juga memiliki rencana untuk berpartisipasi secara besar-besaran di pameran perdagangan dan investasi, Expo 2020 di Dubai pada 20 Oktober 2020. Namun, acara tersebut baru dilaksanakan pada Oktober 2021, karena meningkatnya wabah COVID-19 (Musthafa Abd

Rahman, 2020). Hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel seringkali dipengaruhi oleh posisi mereka di poros kekuasaan politik (political axes of power). Sebelum adanya rencana kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel, kedua negara telah menjalin hubungan kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi dan keamanan. Keterbatasan kerja sama yang ada di bidang-bidang tersebut sebagian besar dilakukan melalui forum multilateral (Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, 2020).

Palestina menganggap bahwa kesepakatan antara Uni Emirat Arab dan Israel merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan mereka. Iran dan Turki juga mengemukakan keras atas normalisasi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh UEA dan Israel. Keduanya beranggapan bahwa UEA berkhianat atas perjuangan Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dari Israel. Sedangkan, Amerika Serikat beranggapan bahwa kesepakatan antara UEA dan Israel merupakan suatu jalan menuju kemajuan Timur Tengah. Amerika Serikat berharap negara – negara arab lain dapat mengikuti jejak UEA (Simela Victor Muhammad, 2020). Organisasi Kerja sama Islam (OKI) mengeluarkan pendapat bahwa tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel sampai negara itu mengakhiri pendudukannya atas tanah Arab dan Palestina. Sekretaris Jenderal OKI, Yousef Al-Othaimen mengatakan bahwa membangun hubungan normal antara negara – negara anggota organisasi dan negara pendudukan Israel tidak akan tercapai sampai akhir pendudukan Israel atas tanah Arab dan Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk al-Quds (Rhany Chairunissa Rufinaldo, 2020).

Sejak 1967, Israel mengumumkan tidak akan kembali ke batas-batas di tepi barat dan Gaza. Namun, pada bulan Mei 2020 secara terang-terangan menyatakan rencananya untuk menduduki tepi barat. Warga Palestina yang berada di tepi barat dan Gaza sangat mengkritik kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik UEA-Israel dan melihatnya

sebagai pengkhianatan atas hak-hak mereka. Mereka juga memasang spanduk yang bertuliskan “pengkhianatan” dan “tidak untuk normalisasi dengan penjajah” yang dipasang di seluruh wilayah Palestina. Otoritas negara Palestina dengan jelas menanggapi untuk menolak berbagai transaksi. Adanya kesepakatan normalisasi ini dapat memengaruhi masa depan kedaulatan Palestina dan melegitimasi pendudukan Israel (Dharika Athray et al., 2020).

Salah satu alasan utama yang membuat Uni Emirat Arab melakukan normalisasi hubungan dengan Israel yaitu janji Israel untuk menghentikan aneksasi di tepi barat. Namun, pernyataan tersebut berubah dengan Israel mengaku hanya akan menanggukannya saja dan tidak berencana untuk menghentikannya (CNN Indonesia, 2020). Pimpinan Palestina beranggapan bahwa kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik UEA-Israel merupakan bentuk pengkhianatan atas Al-Aqsa, Yerusalem, dan perjuangan masyarakat Palestina. Lebih lanjut, beliau menganggap bahwa Uni Emirat Arab secara tidak langsung mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selain itu, alasan utama mengenai pemberhentian aneksasi tepi barat melalui normalisasi hubungan dinilai hanya berupa argumen saja (Muhammad Nur Fahmi & Julio Alifiansyah, 2020).

Perjanjian Abraham (Abraham Accord) adalah titik awal untuk visi yang baru dan dapat dicapai untuk masa depan Timur Tengah. Uni Emirat Arab percaya bahwa perjanjian tersebut merupakan langkah penting untuk menuju era keamanan dan stabilitas. Selain itu, menjalin hubungan dengan Israel dalam isu – isu regional menunjukkan potensi besar dalam bidang diplomatik, sains, budaya, dan ekonomi. Akan tetapi, proses hubungan bilateral dengan Israel secara langsung akan membutuhkan banyak tahap. Namun, upaya untuk mewujudkan potensi perjanjian itu bergerak dengan cepat. Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, UEA dan Israel mulai bekerja sama untuk memperluas dan mendalami

penelitian serta perawatan terhadap COVID-19. Melalui kesepakatan ini, Uni Emirat Arab dan Israel berupaya untuk menggalang upaya global untuk memperkuat perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di Timur Tengah dan sekitarnya (UNITED ARAB EMIRATES MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS & INTERNATIONAL COOPERATION, 2021).

Dari uraian diatas yang membahas politik di kawasan Timur Tengah terutama hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Israel yang dipengaruhi oleh keseimbangan kekuatan tertentu, ini menjadi salah satu hal yang harus tetap menjadi fokus perhatian peneliti dan pengambil kebijakan. Adanya normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dan Israel ini menjadi perhatian di kawasan Timur Tengah yang menyatakan situasi ini dapat menimbulkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dengan adanya permasalahan ini, penulis tertarik untuk membahas keseimbangan kekuatan seperti apa yang akan terbentuk di kawasan Timur Tengah pada normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dan Israel.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti berdasarkan latar belakang diatas ialah apa keseimbangan kekuatan yang terbentuk di kawasan Timur Tengah dari normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dan Israel?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian terhadap pembahasan ini yaitu untuk mengidentifikasi keseimbangan kekuatan baru yang terjadi di kawasan Timur Tengah dalam normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dan Israel.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk para Akademisi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional terkait keseimbangan kekuatan baru yang terjadi di kawasan Timur Tengah dalam normalisasi hubungan diplomatik Uni Emirat Arab dan Israel.

DAFTAR PUSTAKA

- A. MAALIKA MULKI. (2015). HUBUNGAN RUSIA DAN PALESTINA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN VLADIMIR PUTIN SEJAK TAHUN 2012. *Repository.Umy.Ac.Id*, 68–72.
- Abu Dhabi Investment Office officially launches in Israel*. (2021, April 13). *Calcalistech.Com*. calcalistech.com/Article.aspx?guid=3904498
- Abu Dhabi SME Hub. (n.d.). *The Abu Dhabi Investment Office (ADIO)*. Retrieved December 9, 2022, from adsmehub.ae/en/partner-details/the-abu-dhabi-investment-office-adio
- Amna Puri Mirza. (2022, June 10). *Oil industry in the Middle East - Statistics & facts*. *Statista.Com*.
- Arnild Augina Mekarisce. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat . *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 146–150.
- Arry Bainus, & Junita Budi Rachman. (2018). EDITORIAL: Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 109–110.
- Broto Wardoyo, & Rizal Valentino. (2022). “Breaking taboo”: Keputusan Uni Emirat Arab untuk Melakukan Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel. *Global Strategis*, 16(1), 151.
- CNN Indonesia. (2020, September 14). *Normalisasi Arab-Israel dan Nasib Palestina*.
- CVCE. (2016, July 8). *Relations with the Middle East and the oil crises*. http://www.cvce.eu/obj/relations_with_the_middle_east_and_the_oil_crisis-en-3c8a8cee-92ad-40b0-aa12-fbdof5e27a70.html
- Dharika Athray, Rupal Anand, & Vrinda Aiyaswamy. (2020). *UAE-Israel Deal: An Analysis of its Regional Impact*.
- Gamal Thabroni. (2021, February 17). *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* . SERUPA.ID.
- Hans J. Morgenthau. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (First). Alfred A. Knopf, Inc.
- hedsidea.com. (2016, August 17). *Balance of Power dalam Ilmu Hubungan Internasional*. *Hedsidea.Com*.
- idtesis.com. (2012, January 4). *Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif*. *Idtesis.Com*. <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>
- Imam Gunawan. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. In *The Learning University*.
- Jack C. Plano, & Roy Olton. (1988). *THE INTERNATIONAL RELATIONS DICTIONARY* (4th ed.). ABC-Clio, Inc. .

- Khairunnisa Yasir. (2021). PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI UNI EMIRAT ARAB DALAM MENORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN ISRAEL. *Jurnal Universitas Andalas*, 2–3.
- Martin Chulov. (2022, January 17). Suspected drone attack in Abu Dhabi kills three and raises tensions. *The Guardian*.
- Mat Nashed. (2022, June 1). *The UAE and Israel Have High Hopes for Their Historic Trade Deal. Experts Are Skeptical*. Time.Com. time.com/6183180/israel-uae-trade-deal
- Ministry of Foreign Affairs. (2022, May 30). *Israel-UAE to sign historic Free Trade Agreement*. [Www.Gov.II](http://www.gov.il).
- Muhammad Nur Fahmi, & Julio Alifiansyah. (2020, August 25). *Kontradiksi Respon Negara-Negara Arab terhadap Kesepakatan UEA-Israel*. Jama'ah Shalahuddin UGM.
- Musthafa Abd Rahman. (2020). Isu Vaksin COVID-19 Pererat UEA-Israel. *KOMPAS*.
- OLEG YEGOROV. (2014, November 17). Mengenang Yasser Arafat, Pemimpin Palestina di Mata Moskow. *RUSSIA BEYOND*.
- Omar Rahman. (2021). *The emergence of GCC-Israel relations in a changing Middle East*.
- Pupu Saeful Rahmat. (2009). PENELITIAN KUALITATIF. *EQUILIBRIUM*, 5(9), 2–3.
- Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono. (2020a). Analisis Kebijakan Uni Emirat Arab dalam Normalisasi Hubungannya dengan Israel. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 7(2), 136.
- Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono. (2020b). Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina. *Jurnal ICMES*, 4(2), 172–173.
- Rhany Chairunnisa Rufinaldo. (2020, August 25). *OKI: Tak ada normalisasi sampai Israel akhiri pendudukan*. Anadolu Agency.
- Richard Little. (2007). *The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths and Models*. Cambridge University Press.
- Simela Victor Muhammad. (2020). NORMALISASI HUBUNGAN UNI EMIRAT ARAB-ISRAEL DAN ISU PALESTINA. *INFO Singkat*, XII(17), 7–8.
- Surwandono. (2013). Relasi Antara Tingkat Konflik di Dunia Islam Dengan Setting Geografi Politik: Studi Kasus Konflik di Kawasan Timur Tengah. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 57.
- The Historian of the U.S. Department of State. (n.d.-a). *Camp David Accords and the Arab-Israeli Peace Process*. History.State.Gov. Retrieved December 10, 2022, from history.state.gov/milestones/1977-1980/camp-david
- The Historian of the U.S. Department of State. (n.d.-b). *The Arab-Israeli War of 1948*. History.State.Gov. Retrieved December 10, 2022, from history.state.gov/milestones/1945-1952/arab-israeli-war

Timur Tengah, Kawasan Paling Berbahaya . (2016, February 29). *KOMPAS*, 11.

TOI STAFF and AGENCIES. (2022, January 18). Bennet offers UAE “security and intelligence support.” *THE TIMES OF ISRAEL*.

UNITED ARAB EMIRATES MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS & INTERNATIONAL COOPERATION. (2021, December 7). *Bilateral Relationship*.

Yulia Rimapradesi, & Ahmad Sahide. (2021). Kepentingan Negara-Negara Arab (Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan dan Maroko) Melakukan Normalisasi Hubungan dengan Israel. *MANDALA: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* , 4(1), 68–69.